

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Ratio legis Perbup Gunungkidul berdasarkan:

- a. Landasan Filosofis, yakni Perbup Gunungkidul telah sejalan dengan sila-sila Pancasila kecuali sila ke-4 yakni tidak adanya representasi rakyat atau DPRD Kabupaten dalam pembentukan suatu peraturan yang membutuhkan pembahasan bersama dengan masyarakat untuk menjawab kebutuhan masyarakat Gunungkidul.
- b. Landasan Sosiologis, yakni Perbup Gunungkidul dapat menjawab persoalan masyarakat antara lain: angka bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul yang masih tinggi dan kepercayaan masyarakat terhadap mitos *Pulung Gantung* sebagai penyebab bunuh diri yang masih tinggi.
- c. Landasan Yuridis, dari segi terbentuknya yakni Perbup Gunungkidul lebih tepat dikategorikan sebagai produk diskresi karena bukan lahir dari delegasi peraturan maupun atribusi melainkan karena kewenangan bebas yang dimiliki oleh Bupati Gunungkidul.

SARAN

Saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

- a. Isu tentang bunuh diri merupakan isu yang kurang diperhatikan dan belum menjadi sorotan di berbagai daerah di Indonesia. Padahal bunuh diri merupakan tragedi kemanusiaan yang menunjukkan ketidakberdayaan sistem

di berbagai lini dalam kemasyarakatan. Hal pertama yang seharusnya dilakukan untuk menghadapi kasus bunuh diri adalah dengan melakukan penelitian secara mendalam.

- b. Bunuh diri termasuk masalah yang masih sering ditutup-tutupi oleh Pemerintah sehingga diperlukan penelitian dan keterbukaan dari masyarakat agar dapat melahirkan peraturan yang tepat sebagai pedoman dalam mencegah kasus bunuh diri. Tahap pencegahan dapat berupa pemberian sosialisasi oleh tenaga ahli kesehatan mental kepada masyarakat secara berkala. Diperlukan juga peraturan yang lebih tinggi seperti Perda Kabupaten Gunungkidul yang bertujuan agar kebutuhan masyarakat yang direpresentasikan dengan hadirnya DPRD Kabupaten Gunungkidul benar-benar dapat dipenuhi.
- c. Pembaharuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dalam segi istilah apakah itu kesehatan jiwa atau kesehatan mental serta dimasukkannya pasal yang mengatur tentang pencegahan serta penanggulangan bunuh diri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bagir Manan, 2006, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Darmaningtyas, 2002, *Pulung Gantung: Menyingkap Tragedi Bunuh Diri di Gunungkidul*, Salwa Press, Yogyakarta.
- Emile Durkheim, 2005, *Suicide: A Study in Sociology*, Taylor & Francis e-Library, London
- Kaelan, 2008, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta
- Kartini Kartono, 2000, *Hygiene Mental*, Mandar Maju, Bandung.
- Maria Farida Indrati Soeprpto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprpto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta
- Rachmat Trijono, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Paps Sinar Sinanti, Jakarta.
- Riawan Tjandra. W., 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sulaiman al-Husain, 2005, *Mengapa Harus Bunuh Diri?*, Qisthi Press, Jakarta.
- Tim Penanggulangan dan Penanganan Bunuh Diri Kabupaten Gunungkidul, 2018, *Penanganan Faktor Resiko Bunuh Diri*, Yogyakarta.

JURNAL

- Alfran Biroli, 2018, "Bunuh Diri Perspektif Sosiologi", *Simulacra*, Vol. 1 Nomor 2 November 2018, Universitas Trunojoyo Madura.
- Ayu Ariyana Mulyani & Wahyu Eridiana, 2018, "Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Fenomena Bunuh Diri di Gunungkidul", *Sosietas*, Vol. 8 Nomor 2 2018, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mohammad Yuhdi, 2013, "Peranan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Likhitaprajna*, Vol-XV/No-1/April/2013, Universitas Wisnuwardhana.
- Ni Luh Gede Astariyani, 2015, "Kewenangan Pemerintah dalam Pembentukan Peraturan Kebijakan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4 Nomor 4 : 688-699 Desember 2015, Universitas Udayana Bali.
- Petrus Kadek Suherman, 2017, "Delegasi Regulasi dan Simplifikasi Regulasi dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah", *Jurnal Advokasi*, Vol-7 Nomor 1 2015.
- Rizki Annistia Nazri, Rin Widya Agustin, Arif Tri Setyanto, 2016, "Hubungan antara Spiritualitas dengan Kecenderungan Bunuh Diri pada Orang Dewasa Awal di Kabupaten Gunungkidul", Universitas Sebelas Maret.
- Soetji Andari, 2017, "Fenomena Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul", *Sosio Konsepsia*, Vol-7 Nomor 01 September-Desember 2017, Balai Besar Penelitian, Pengembangan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Victor Imanuel W. Nalle, 2016, “Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Refleksi Hukum*, Vol-10 Nomor 1 2016, Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

TESIS/DISERTASI

Muhammad Thabrani Mutalib, 2017, *Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) di Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri. Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 56. Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Yogyakarta.

INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online/daring*, diakses pada 22 Agustus 2019 dan 12 Oktober 2019

<https://enacademic.com/.searchall.php?SWord=ratio+legis&stype=0&btype=1>, diakses pada 2 Agustus 2019.

<https://news.okezone.com/read/2019/05/11/510/2054398/kasus-bunuh-diri-di-gunungkidul-meningkat-pesat>, diakses pada 3 Agustus 2019.

<https://www.who.int/docs/default-source/mental-health/suicide-prevention/life-brochure.pdf>, diakses pada 22 Agustus 2019.

https://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/en/, diakses pada 22 Agustus 2019.

- <https://www.nytimes.com/2019/08/15/us/suicide-prevention-hotline-988.html>, diakses pada 22 Agustus 2019.
- http://www.searo.who.int/entity/world_health_day/2017/depression-factsheet.pdf, diakses pada 22 Agustus 2019.
- <https://news.detik.com/berita/d-4391652/sudah-lama-mati-hotline-cegah-bunuh-diri-akan-dihidupkan-lagi>, diakses pada 26 Agustus 2019.
- <https://www.kemendes.go.id/resources/download/info-terkini/rakakesnas-2019/SESI%20I.Kelompok%202/2-Upaya-Penurunan-Prevalensi-ODGJ-dan-ODMK.pdf>, diakses pada 26 Agustus 2019.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/22/jawa-tengah-provinsi-dengan-kasus-bunuh-diri-terbanyak-di-indonesia>, diakses pada 26 Agustus 2019.
- https://www.vice.com/id_id/article/ezxkn/patrol-khusus-pencegah-bunuh-diri-di-korsel, diakses pada 27 Agustus 2019.
- <https://www.who.int/westernpacific/health-topics/suicide>, diakses pada 27 Agustus 2019.
- <https://www.legal-lingo.net/ratio-legis/>, diakses pada 16 Oktober 2019.
- <https://news.okezone.com/read/2019/05/11/510/2054398/kasus-bunuh-diri-di-gunungkidul-meningkat-pesat>, diakses pada 22 Oktober 2019.
- <https://lifestyle.sindonews.com/read/1190568/166/kasus-bunuh-diri-indonesia-tempati-posisi-8-di-asia-tenggara-1490164957>, diakses pada 10 Desember 2019.
- <http://news.unair.ac.id/2019/10/10/paradigma-kesehatan-mental/> diakses pada 17 Februari 2020.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/22/jawa-tengah-provinsi-dengan-kasus-bunuh-diri-terbanyak-di-indonesia>, diakses pada 18 Februari 2020.